BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Asas Motivasi

2.1.1 Pengertian Asas

Asas (prinsip) merupakan suatu peryataan fundamental atau kebenaran fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan ”intisari” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tetapi bukanlah sesuatu yang absolut atau mutlak. Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan berubah-ubah.

Motivasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari semua unsur yang terkait sehingga hasil akhir yang diharapakan tidak akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Hasibuan, mengemukakan asas-asas motivasi sebagai berikut:

1. Asas Mengikutsertakan artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan
2. Asas Komunikasi artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi
3. Asas Pengakuan artinya memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya.
4. Asas Wewenang yang didelegasikan artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan, bahwa dengan kemampuan dan kreativitasnya ia mampu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik

5. Asas Adil dan Layak artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas "asas keadilan dan kelayakan" terhadap semua karyawan harus adil dan layak kalau masalahnya sama
6. Asas Perhatian Timbal Balik artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi

(Hasibuan, 2007:221).

Menurut uraian di atas asas motivasi merupakan sesuatu yang mendasar bagi setiap organisasi, untuk keberhasilan organisasi, melaui Asas Mengikutsertakan, Asas Komunikasi, Asas Pengakuan, Asas Wewenang yang didelegasikan, Asas Adil dan Layak, Asas Perhatian Timbal Balik.

2.1.2 Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin "Mavere" yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan.

Motivasi secara implisit mengandung arti pemimpin harus ada di tengah-tengah anak buah untuk memberikan bimbingan. Disamping itu juga harus melakukan integrasi antara individu dengan kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat, sedangkan secara eksplisit harus ada perangsang, baik yang bersifat materi maupun non materi.

Menurut Stephen P. Robbine, dalam bukunya Hasibuan. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* mengatakan bahwa motivasi adalah:

> *We will define motivation as the willingness to exert high levels of effort toward organization goals, conditional by efforts ability to satisfy some individual need*. (Kita akan mendefinisikan motivasi sebagai suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha memuaskan kebutuhan individu (dalam Hasibuan, 2007:219).

Menurut pendapat diatas motivasi merupakan serangkean usaha seseorang secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, pencapaian tujuan organisasi tersebut dipengaruhi oleh kemampuan individu di dalam suatu badan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Merihot mengatakan bahwa pengertian motivasi adalah:

> Faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras (Merihot 2003:321).

Berdasarkan pengertian diatas motivasi adalah kegiatan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan dan mendorong aparaturnya untuk keberhasilan dalam suatu organisasi dengan bentuk usaha yang keras. Menurut pendapat Merle J. Moskowits, dalam bukunya Hasibuan. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* mengatakan bahwa motivasi adalah:

> *Motivation is usually defined the initiation and direction of behavior and the study of motivation is in effect the study of course of behavior*. (Motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiatif dan pengarahan tingkah laku dan pembelajaran motivasi sebenarnya merupakan pembelajaran tingkah laku (dalam Hasibuan, 2007:220).

Berdasarkan uraian di atas motivasi adalah metode pengarahan tingkah laku seseorang aparatur oleh pemimpin organisasi, motivasi merupakan pembelajaran tingkah laku. Sedangkan menurut Mathis mengatakan bahwa pengertian motivasi kerja adalah sebagai berikut : ”Motivasi merupakan hasrat di

dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan" (Mathis 2001:89).

Berdasarkan uraian diatas motivasi merupakan hasrat yang di miliki oleh seorang aparatur untuk memajukan organisasi nya, proses pengarahan dari atasan kepada bawahan, atasn memberikan motivasi kepada bawahan untuk mengerjakan sesuatu hal yang dianggap akan mencapai tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan Menurut Hasibuan, Motivasi harus dilakukan pimpinan terhadap bawahannya karena:

1. Pimpinan membagi-bagikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk dikerjakan dengan baik.
2. Karena ada bawahan yang mampu untuk mengerjakan pekerjaannya, tetapi ia malas atau kurang bergairah mengerjakannya.
3. Untuk memelihara dan atau meningkatkan kegairahan kerja bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
4. Untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kepada bawahannya.

(Hasibuan, 2007:216-217).

Menurut uraian diatas, motivasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi dapat membagikan pekerjaan kepada aparatur, sehingga aparatur dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang diperintah oleh pimpinannya, pimpinan juga dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kegairahan kerja, dan pimpinan dapat memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi.

2.1.3 Tujuan Motivasi

Seoarang pemimpin dalam organisasi dapat memberikan motivasi kepada aparatur sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, Adapun tujuan pemberian

motivasi menurut Suwatno mengatakan bahwa tujuan motivasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan
2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan
4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan
5. Meningkatkan pengadaan karyawan
6. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan.
7. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan
8. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.
9. Meningkatkan penggunaan alat-alat dan bahan baku

(Suwatno 2001:147).

Maksud uraian diatas pemberian motivasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada aparatur untuk peningkatan kinerja yang lebih efektif dan efisien dapat mendorong semangat kerja, meningkatkan moral dapat dilakukan pemahaman agama yang baik sehingga dimungkinkan tidak ada praktek kecurangan – kecurangan misalnya KKN dalam organisasi KPU Provinsi Jawa Barat. meningkatkan produktifitas, untuk meningkatkan produktifitas, proses peningkatan produktivitas kerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat khususnya Sub Bagian Humas dapat memberi kesempatan terbaik untuk membangun pengalaman yang terus berkembang untuk membuat peningkatan yang berarti dalam produktivitas organisasi harus berusaha mencapai tingkat terbaik, upaya tersebut seharusnya menjadi aspek manajemen rutin yang berkesinambungan. meningkatkan pengadaan karyawan, untuk menutupi kekurangan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat, biasanya KPU Provinsi Jawa Barat dapat mengkrekrut dari PEMDA, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang berkopenten untun menjadi aparatur KPU Provinsi Jawa Barat. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan dalam suatu organisasi aparatur

Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat di tuntut dan dapat mempertahankan loyalitas kreativitas, dan partisipasi yang tinggi yang lebih dari pada lembaga pemerintah lainnya. Meningkatkan penggunaan alat-alat dan bahan baku dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti penggadaan jaringan internet, komputer untuk mensosialisasikan hasil penghitungan suara melalui *website*.

2.1.4 Jenis-Jenis Motivasi

Motivasi merupakan hal yang mendasar bagi seorang pemimpin memberikan motvasinya, dibawah ini adalah jenis-jenis motivasi yang diberikan oleh seoarang pemimpin kepada bawahannya. Jenis-jenis motivasi ini dikemukakan menurut Suwatno mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut :

1. Motivasi Positif
   Motivasi positif yaitu motivasi yang diberikan manajer untuk memotivasi atau merangsang karyawan bawahan dengan memberikan hadiah kepada yang berprestasi, sehingga meningkatkan semangat untuk bekerja
2. Motivasi Negatif
   Motivasi negatif yaitu motivasi yang diberikan manajer kepada karyawan bawahan agar mau bekerja dengan sungguh-sungguh dengan memberikan hukuman. Hal ini dalam jangka waktu pendek akan meningkatkan semangat kerja karena karyawan takut mendapat hukuman. Namun dalam jangka waktu panjang hal tersebut akan menimbulkan dampak kurang baik

(Suwatno 2001;146).

Berdasarkan pendapat di atas motivasi terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah seorang pemimpin organisasi yaitu Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dapat memotivasi bawahan dengan cara memberikan hadiah kepada bawahannya yang

berprestasi. Sedangkan motivasi negatif adalah pemimpin memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada bawahannya yang pekerjaannya kurang baik.

Jenis motivasi tersebut harus digunakan dengan tepat dan seimbang, supaya dapat meningkatkan semangat kerja bawahannya. Motivasi positif efektif untuk jangka waktu panjang sedangkan motivasi negatif efektif untuk jangka waktu pendek, dalam hal ini pemimpin harus konsisten dan adil dalam penerapannya.

2.1.5 Metode-Metode Motivasi

Metode-metode motivasi ini dapat dilakukan oleh seoarng pemimpin untuk memberikan semangat kepada bawahan untuk pencapaian kinerja secara maksimal. Metode-metode motivasi ini yang dikemukakan Suwatno (2001:149). mengatakan bahwa metode motivasi adalah sebagai berikut :

1. Motivasi langsung (*Direct Motivation*)
   Motivasi langsung adalah motivasi baik materil maupun non materil yang diberikan secara langsung pada setiap karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya kepuasan. Pemberian motivasi langsung bisa dalam bentuk ucapan, pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, ataupun bintang jasa
2. Motivasi Tak Langsung (*Indirect Motivaton*)
   Motivasi tak langsung adalah pemberian motivasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas agar karyawan senang atau betah dan bersemangat dalam kerjanya. Misalnya menyediakan mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang nyaman dan terang, sarana pekerjaan yang serasi, seta penempatan yang tepat, sehingga dapat merangsang karyawan untuk bekerja dengan semangat dan meningkatkan produktivitas kerja

(Suwatno 2001:149).

Menurut uraian diatas bahwa motivasi yang diberikan oleh seoarang pemimpin kepada bawahan terdapat dua (2) cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin, pertama, metode langsung ini adalah *material* dan *non material* maksudnya yaitu memberikan pujian, penghargaan bonus, dan piagam kepada bawahan yang berprestasi. kedua, motivasi tidak langsung, memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti penggadaan jaringan internet, komputer untuk melakukan penghitungan suara yang dapat menunjang gairah kerja.

2.1.6 Model-model Motivasi

Pemberian motivasi melelui pemimpin kepada bawahanya terdapat beberapa model motivasi yang di kemukakan oleh Veithzal Rivai mengatakan bahwa model-model motivasi adalah sebagai berikut :

1. Model Tradisional
   Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil, para menajer menggunakan sistem upah insentif, semakin banyak mererka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka
2. Model Hubungan Manusiawi
   Model hubungan manusiawi yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya
3. Model Sumber Daya Manusia
   Model Sumber Daya Manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini, bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan

organisasi dan anggotanya, dimana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing
(Veithzal Rivai 2005:470).

Menurut uraian diatas seorang pemimpin dapat memberikan motivasinya dengan berbagai model motivasi yaitu model tradisional, model ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin yaitu Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam memberikan motivasi kepada aparatur dengan menggunakan sistem upah insentif, semakin banyak mererka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka, model hubungan manusiawi model ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin yaitu Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam memberikan motivasi kepada aparatur mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan, model sumber daya manusia menjelaskan bahwa seorang pemimpin yaitu Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam memberikan motivasi kepada aparatur bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja.

2.2 Sosialisasi

2.2.1 Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi mencangkup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Sosialisasi merupakan mata rantai paling penting diantara sistem sosial lainnya, karena dengan adanya sosialisasi keterlibatan indiidu-individu

sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengrtian sosialisasi menurut Charles R. Wright sebagai berikut:

> "Proses ketika individu menapatkan kebudayaan kelomoknya dan menginteralisasikan (sampai tingkat tertentu) normas-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain" (Charles R. Wright dalam Sutaryo, 2005:156).

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahui, seperti belajar mengenai norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L. Berger mengatakan bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat (Peter L. Berger dalam Sutaryo, 2005:156).

Uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antar manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin berkerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasan merupakan kajian dan konsep dari politik.

Mengenai hubungan sosialisasi dengan politik terletak pada objek dari sosialisasi, dapat diartikan bahwa pengertian sosialisasi sama dengan pengertian dari sosialisasi politik. Fred. Greenstein menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu:

1. Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab
2. Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan

(Fred. Greenstein dalam Rush & Althoff, 2002:35-36).

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

2.2.2 Jenis-Jenis Sosialisasi

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L. Berger dan Luckman terdapat dua jenis sosialisasi, yaitu:

1. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak
2. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat

(Peter L. Berger dan Luckman wikipedia Indonesia. Melalui *http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi* [13/07/2007]).

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal.

2.2.3 Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Adapun pengertian nilai dan norma menurut Hasan Mustafa adalah:

> "Nilai adalah prinsip-prinsip etika yang dipegang dengan kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikatnya dan sangat berpengaruh pada prilakunya sedangkan norma, yaitu aturan-aturan baku tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sangsi negatif dan positif" (Hasan Mustafa, Wikipedia Indonesia melalui *http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi* [13/07/2007]).

Menuurut uraian di atas materi sosialisasi adalah nilai dan norma, nilai merupakan peranan yang mengikat prilaku setiap individu atau sekelompok orang sehingga sangat berpengaruh terhadap organisasi, sedangkan norma merupakan suatu aturan yang ada di dalam suatu organisasi yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota organisasi tersebut.

Pengetahuan secara mendasar sifatnya adalah faktual (walupun tidak esklusif), pengetahuan dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap, begitupun sebaliknya. Pengetahuan dapat dipergunakan untuk mendukung suatu

nilai khusus atau suatu sikap setelah nilai dan sikap terbentuk, selain itu pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap. Sikap-sikap berkaitan dengan nilai-nilai, dalam mana kepercayaan-kepercayaan individu dapat memainkan peranan yang penting dalam penentuan reaksi terhadap rangsangan khusus dan terhadap pembentukan sikap-sikap ataupun pendapat-pendapat khusus, akan tetapi sikap-sikap dapat mendahului nilai-nilai, khususnya yang berlangsung pada dasar sosialisasi.

2.2.4 Mekanisme Sosialisasi

Agen sosialisasi dalam mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi melalui beberapa cara:

1. Imitasi, merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu-individu, dan merupakan hal yang penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak.
2. Intruksi, merupakan peristiwa penjelasan diri, akan tetapi para ahli mengatakan hal tersebut tidak terlalu diperlukan karena terbatas pada proses belajar formal
3. Motivasi, lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman. Motivasi adalah merupakan bentuk tingkah laku yang tepat yang di pelajari melalui proses coba-coba dan gagal, individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan sama cocok dengan sikap-sikap dan pendapat-pendapat sendiri

(dalam Rush&Allthof, 2002:40).

Berdasarkan uraian di atas cara imitasi lebih cocok diterapkan dalam sosialisasi untuk masa kanak-kanak. Intruksi lebih banyak dilakukan pada proses belajar formal. Imitasi dan intruksi merupakan tipe-tipe khusus dari pengalaman, sedangkan motivasi merupakan suatu bentuk tingkah laku yang dapat di pelajari dengan melalui proses coba-coba dan mengalami kegagalan maka individu tersebut dapat belajar dari pengalaman.

2.2.5 Subyek-Subyek atau Sasaran Sosialisasi

Subyek dan sasaran sosialisasi adalah masyarakat. Agen sosialisasi mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi kepada masyarakat. agen sosialisasi akan memobilisasi masyarakat untuk mendukung program yang terdapat pada materi sosialisasi dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Pengertian masyarakat menurut Harold J. Laski adalah sekolompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (dalam Budiarjo, 1993:34). Kehidupan masyarakat, mencakup hubungan antar individu-individu dan kelompok, dalam lingkungan kelompoknya terdapat interaksi sosial antar masing-masing individu untuk dapat memahami lingkungan satu sama lain.

Sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya tampak jelas, khususnya dalam masyarakat yang tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan berdirinya tradisi-tradisi kemasyarakatan yang kuat, yang menetapkan struktur dan peranan-peranan masyarakat. Menurut Michael Rush dan Phillip Althof peranan sosialisasi dalam masyarakat adalah:

> "Proses sosialisasi dalam masyarakat telah membentuk orientasi-orientasi dan pola-pola tingkah laku mayoritas rakyatnya, proses tersebut dicirikan dengan kesatuan intrinsik, legetimasi peranan sosial dan pencapaian status" (Rush & Althof, 2002:102).

Berdasarkan uraian di atas peranan sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat sehingga telah terbentuk orientasi-orientasi dan pola tinglah laku. Proses sosialisasi dengan sendirinya telah memberikan pelajaran

terhadap kelompok masyarakat mengenai sistem interaksi antar kelompok-kelompoknya.

2.2.6 Hubungan Sosialisasi Dengan Komunikasi

Kehidupan sosial atau proses sosial didasarkan pada komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Uchjana adalah sebagai berikut:

> "Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *comunication* berasal dari kata Latin *comunicattio*, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau ada dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan" (Uchjana, 2005:9).

Komunikasi antar manusia hanya dapat terjadi, apabila ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya dapat berlangsung apabila didukung oleh adanya sumber pesan, media, penerima, dan efek.

Komunikasi dalam kehidupan manusia yaitu saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga dengan demikian terbentuklah pengalaman sama dan pengetahuan tentang pengalaman masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Susanto bahwa komunikasi merupakan dasar dari exsistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat.

Komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam pengoprasian rangsangan dalam masyarakat (Susanto, 1992:1). Manusia dengan mekanisme komunikasi, dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang dinginkan. Dalam komunikasi terdapat unsur komunikasi yaitu komunikator, isi atau pesan-pesan komunikasi, dan komunikan.

Proses sosialisasi yang menjadi komunikator adalah agen sosialisasi, materi sosialisasi adalah isi dari komunikasi dan yang menjadi komunikan adalah masyarakat atau sasaran sosialisasi. Berhasilnya proses sosalisasi ditentukan oleh metode penyampaian pesan yang baik oleh agen sosialisasi kepada sasaran sosialisasi. Berdasarkan proses tersebut, berlangsung komunikasi antara komunikator dan komunikan baik secara langsung maupun melalui media sebagai salah satu sarana sosialisasi.

2.3 Konsep Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai produk pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pemilu. Undang-undang RI tentang penyelelenggara pemilihan umum pasal (1) ayat (1) menyebutkan bahwa, pemilihan umum, selanjutnya Pemilu adalah:

> Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum No.22 Tahun 2007:Pasal (1) ayat (1))
> (Sumber: UU RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007).

Menurut uraian diatas merupakan penyelenggara pemilihan umum yang disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebagai produk pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pemilu dengan menyelenggarakan pemilihan umum.

> Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 ayat 4) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerh dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum No.22 Tahun 2007:Pasal (1) ayat (4))
> (Sumber: UU RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007).

Sedangkan menurut A. Sudiharto Djiwandono pemilu adalah sarana demokrasi yang penting, ia merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (dalam Effendy, 1993:234). Penyelenggaraan pemilu para pemilih juga disebut dengan Konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa Kampanye. Kampanye dilakukan pada masa yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara dan Pemilihan Umum merupakan wadah aspirasi rakyat dimana rakyat dapat mengemukakan keinginan dalam memilih pimpinannya melalui Sosialisasi politik yang dilakukan dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan Pemilu.

2.3.1 Konsep Partai Politik

Pemilu akan terlaksana apabila ada pasangan calon dimana keberadaannya sangat penting bagi terselenggaranya pemilihan umum. Oleh karena itu untuk melaksanakan suatu pemilu harus ada partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Menurut Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:

> Partai politik adalah partai politik pesertra Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
> (Sumber: Undang-Undang Pemilu pasal(1)ayat(4) Tahun 2003).

Partai politik merupakan sarana sosialiasi politik dan sebagai komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik, sehingga keduanya mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

2.3.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik juga bukan hanya sebagai kelompok yang mempertahankan kekuasaan, tetapi partai politik juga memiliki fungsi yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, mengemukakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
   Partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang, dan partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah, dengan demikian terjadi arus informasi
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
   Proses dimana seseorang memperoleh skap dan orientasi terhadap penomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik, dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan selauas mungkin. Untuk itu partai akan berusaha menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan kepwntingan umum
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
   Partai politik juga berfungsi untuk mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
   Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar, jika terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering fungsi-fungsi tersebut di atas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya

> informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat; yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partasi yang sempit dengan akibat konflik tidak diselesaikan akan tetapi malah dipertajam
> (Budiarjo, 2002:166).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa partai politik merupakan suatu kelompok tertentu dimana kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kekuasaan dipemerintahan melalui sarana komunikasi politik merupakan aspirasi dari masyarakat mengenai pemerintahan di tampung oleh partai politik, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah, sosialisasi politik Partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik mengenai mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, rekrutmen politik berfungsi untuk mengkrekrut orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dan berbakat dan bergerak secara aktif dalam lingkungan partai, pengatur konflik berfungsi sebagai penmgatur konflik yang di dalam pemeintah atau lembaga lainnya sehingga konflik tersebut dapat teratasi.

2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Undang-undang RI No. 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal (1) ayat (7) menyebutkan bahwa KPU adalah :

> Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum.
> (Sumber: Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum No.22 Tahun 2007:Pasal (1) ayat (7)).

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa KPU merupakan penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain menyelenggarakan pemilu, KPU juga memiliki tugas, kewenangan, dan tanggungjawab yang khusus.

2.4.1 Kewajiban KPU

Berdasarkan Undang-Undang. Tentang penyelenggara pemilihan umum Pasal (9) Ayat 4 menyebutkan bahwa kewajiban KPU sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan merata;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Memelihara arsip dan dukumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawanslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

(Sumber: UU RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007).

2.4.2 Tugas dan wewenang KPU Provinsi

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal (9) ayat (3) meliputi:

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepal Daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
e. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkanya sebagai daftar pemilih;
f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
g. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dala wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU.
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dari seluruh KPU Kabupaten dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan mengumumkannya;
l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah profinsi terpilih dan membuat berita acaranya;
m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada KPU;
n. Memeriksa mpengaduan dan/atau lporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota KPU Kabupaten/kota, sekretaris KPU Provinsi, dan Pegawai secretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang

sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daearh dan Wakil Kepala Daerahprovinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wwenang KPU Provinsi kepada Masyarakat;
r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daera dan Wakil Kepala Daerahkabupaten/kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
t. Melakukan evalusi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah da Wakil Kepala Daerah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang;

(Sumber: UU RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007).

2.2 Sistem Informasi Manajemen

2.5.1 Konsep Dasar Sistem

. Secara sederhana sistem merupakan kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-variabel yang terorganisasi, saling berkaitan dan saling tergantung dan berkaitan satu sama lain. Suatu oganisasi atau lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya dapat menggunakan sistem, penggunaan suatu sistem akan menjadi suatu penggerak organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya

Menurut Davis mendefinisikan sistem sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroprasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud (Davis, 1985:3). Sistem merupakan suatu bagian yang terdapat dalam sebuah alat teknologi seperti komputer yang didalamnya memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan sehingga dapat beroprasi dengan baik dan memiliki sasaran yang tepat yaitu sasaran organisasi.

Sedangkan menurut pendapat Lukas mendefinisikan bahwa sistem sebagai suatu komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung, satu sama lain dan terpadu (Lucas,1983:3). Menurut uraian bahwa sistem merupakan serangkean suatu komponen yang memiliki cara kerja yang terorganisir dengan baik, saling berinteraksi, dan saling bergantung antara sistem yang satu dengan sistem yang lain.

Menurut Gerald. J mendefinisikan bahwa sistem yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau penyelesaian suatu sasaran tertentu. (Gerald.J, 1991:3). Berdasarkan uraian dapat diketahui bahwa sistem merupakan suatu kesatuan rangkaian kerja yang dapat menghasilkan sesuatu dari hasil rangkaian-rangkaian tersebut. Sesuatu yang dihasilkan oleh rangkaian-rangkaian adalah data.

2.5.2 Pengertian Informasi

Informasi sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui keakuratan data yang dihasilkan. Informasi ibarat data yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan didalam suatu organisasi.

Menurut McFadden, dalam bukunya Abdul Kadir yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi,* mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (dalam Kadir, 2002:31). Sedangkan menurut Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi

penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang (dalam Kadir, 2002:31).

Jogiyanto mengemukakan, bahwa informasi adalah hasil pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. (dalam Jogiyanto, 1999:8). Dari pengertian beberapa sumber di atas maka informasi merupakan kumpulan data-data yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arti dan manfaat sesuai dengan keperluan tertentu yang bisa menjadi suatu informasi.

Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat berbicara banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputuan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data yang ditangkap dianggap sebagai input, diproses kembali melalui model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Menurut Mc. Leod informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Akurat, artinya harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya
2. Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi itu diperlukan
3. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan
4. Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap

(dalam Jogiyanto, 1999:10).

Pendapat tersebut di atas mengemukakan, bahwa informasi yang dihasilkan dikatakan berkualitas, apabila infomasi yang didapatkan akurat, tepat waktu, relevan serta lengkap. Suatu informasi merupakan kunci keberhasilan

dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk pengambilan keputusan, karena informasi merupakan faktor penting dalam melakukan kegiatan.

2.5.3 Manfaat Sistem Informasi Manajemen Pada Organisasi

Aktivitas manusia untuk masa sekarang banyak yang berhubungan dengan sistem informasi. Sistem informasi banyak diterapkan dalam suatu organisasi, karena terkait dengan kemampuan yang dapat dilakukannya. Kemampuan utama sistem informasi menurut McLean dan Wetherbe adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar, dan dengan kecapatan tinggi
2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat
3. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses
4. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah
5. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau beberapa lokasi
6. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikaran manusia
7. Mengotomatiskan proses-proses bisnis yang semiotomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual
8. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan
9. Pembiyayaan yang jauh lebih murah dari pada pengerjaan secara manual

(dalam Kadir, 2002:5).

Berdasarkan uraian diatas, sistem informasi diterapkan oleh suatu organisasi karena mempunyai nilai tambah dan dapat membantu organisasi dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini oleh Sub Bagian Humas KPU Provinsi dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Alter mengemukakan terdapat empat peranan penting sistem informasi dalam organisasi, yaitu:

1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas
2. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem
3. Mengkoordinasikan subsistem-subsistem
4. Mengintegrasikan subsistem-subsistem

(dalam Kadir, 2002:8).

Sebuah organisasi memiliki beberapa subsietem. Masing-masing subsistem memiliki kegiatan perencanaan, pengerjaan dan pengendalian tersendiri. Koordinasi antar subsistem dapat dilakukan dengan berbagai informasi. Oleh karena itu, sistem informasi sangat berperan dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi.

2.6 *Elektronik Government*

2.6.1 Pengertian *e-Government*

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat berdampak pada perubahan sosial, budaya dan membuat jarak antar negara makin dekat. Kemajuan tersebut berdampak pada tata pemerintahan. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efektif dan efesien yang diberikan pemerintah. Implementasi teknologi informasi pada pemerintahan dengan istilah *e-Government* diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang diinginkan masyarakat. Pengertian *e-Government* menurut Richardus Eko Indrajit adalah:

> "Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan" (Indrajit, 2004:4-5).

Melalui *e-Government* dapat terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai

informasi dan layanan dari pemerintah, melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik, menuju good governance. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi *e-Government* diharapkan dapat merubah sistem pelayanan pada manajemen pemerintahan dan dapat dimanfaatkannya dengan baik.

2.6.2 Tahapan-Tahapan Implementasi *e-Government*

Setiap proses dalam implementasi suatu kegiatan, untuk mencapai suatu kesempurnaan bentuk implementasi didasarkan pada tahap-tahap. Dalam riset yang dilakukan oleh Deloitte dan Touche, dijabarkan bahwa implementasi *e-Government* dalam pemerintahan terbagi menjadi enam tahapan yaitu:

1. Tahap *information publishing/dissemination*, merupakan tahapan dimana masing-masing instansi di pemerintahan seperti dinas, badan atau minimal pemerintahan daerah tersebut memiliki sebuah situs *website* yang berisikan informasi dan pusat data yang dapat diakses sepanjang waktu
2. Tahap "*official" two-way transaction*, dalam tahapan ini situs telah berkembang dengan melibatkan masyarakat dengan beberapa aktifitas interaktif yang sederhana seperti pengisian form-form kependudukan, survey-survey dan sebagainya
3. Tahap multipurpose portals, dalam tahapan ini seluruh situs yang di miliki oleh berbagai instansi disatukan dalam sebuah portal sesuai dengan klasifikasinya
4. Tahap portals personalization, pada tahapan ini masyarakat telah memiliki akses sendiri berupa login dan *password* sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masyarakat dapat terlayani lebih '*customized*'. Masing-masing masyarakat memiliki *account* sendiri sesuai dengan keperluan dan kepentingannya masing-masing tetapi masih terpisah untuk masing-masing instansi
5. Tahap *clustering of common services*, pada tahapan ini seluruh pelayanan tersebut telah terpadu tanpa dipisah per-instansi yang ada, dalam tahapan ini pengelompokkan lebih diberatkan ke bagian-bagian yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, sehingga file-file dapat lebih sederhana dan sedikit dan mulai dikuranginya pengulangan informasi yang kadangkala dapat terjadi

6. Tahap *full integration and enterprise transformation*, dalam tahapan ini, seluruh data-data, hasil transaksi dan pembayaran atau informasi yang telah masuk dan berasal dari berbagai pihak, baik masyarakat, pebisnis dan lainnya dapat langsung diolah dan diakses kembali dalam bentuk yang lain oleh masing-masing jenis pengakses

(Rianto Wijaya, *http://www.ruangkerja.com/indonesia/article* [13/06/2007]).

Tahapan-tahapan implementasi *e-Government* diatas mengambil contoh *website,* pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan roda pemerintahan harus segera menerapkan *e-Government*. Keberadaan *website* pada pemerintah merupakan bentuk awal penerapan *e-Government,* karena *website* dianggap sebagai gerbang utama pemerintah dalam mempromosikan jati dirinya. Selain itu, *website* merupakan jenis pelayanan bentuk *e-Government* yang paling mudah pengerjaannya, biaya yang sedikit dan mudah digunakan.

2.6.3 Manfaat *e-Government*

Implementasi *e-Government* harus segera dilaksanakan, karena mempunyai banyak manfaatnya. Dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep *e-Government,* yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair menggambarkan manfaat *e-Government* bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (Masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efesiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dan maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis

(dalam Indrajit, 2004:5).

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Melalui penerapan *e-Government* yang tepat akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena *e-Government* adalah salah satu unsur pendukung pemerintah dalam pembangunan.

2.6.4 Proyek-Proyek Pelayanan *e-Government*

Pemerintah mengimplementasikan jenis pelayanan *e-Government* kepada masyarakat melalui beberapa tipe. Jenis-jenis proyek-proyek *e-Government* dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu:

1. *Publish,* di dalam kelas publish terjadi sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas di akses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Alat yang digunakan adalah komputer atau handphone melalu medium internet, dimana alat-alat tersebut dipergunakan untuk mengakses situs *(website)* departemen atau devisi terkait.
2. *Interact,* pada kelas interact terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan, yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara sepesifik, kedua adalah pemerintah menyediakan kanal akses dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. *Transact*, pada kelas ini terjadi interaksi dua arah, akan tetapi masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerja pemerintah.

(Indrajit, 2004:30).

Masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah untuk berbagai kepentingan. Proyek *e-Government* yang dilaksanakan pemerintah merupakan upaya pemerintah dalam melayani masyarakat yang berbasis elektronik. Proyek *e-Government* diterapkan pemerintah berdasarkan komunikasi satu arah dan dua arah serta jasa layanan yang diberikan pemerintah secara gratis atau dipungut bayaran, pungutan bayaran tersebut dikarenakan pemerintah berkerjasama dengan pihak swasta dalam pemenuhan data untuk informasi yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan kelas-kelas tersebut, menggambarkan adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat dalam iklim negara yang demokratis.

2.6.5 Tipe Relasi *e-Government*

Konsep *e-Government* apabila diklasifikasikan menurut Richardurs Eko Indrajit dibagi kedalam empat jenis, yaitu:

1. *Government to Citizens (G-to-C),* tujuannya adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari
2. *Government to Business (G-to-B),* merupakan bentuk relasi antara pemerintah dengan para pengusaha, dengan tujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya
3. *Government to Government (G-to-G),* merupakan interaksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya dengan tujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik dan mekanisme hubungan sosial dan budaya

4. *Government to Employes (G-to-E),* tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat

(Indrajit, 2004:42).

Klasifikasi jenis-jenis *e-Government* di atas adalah yang menjadi dasar bahwa implementasi *e-Government* sangat penting. Jenis-jenis tersebut menggambarkan suatu interaksi, pemerintah sebagai unsur penyelenggara roda pemerintahan sangat membutuhkan akan hubungan dengan masyarakat untuk kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan publik, hubungan dengan para pengusaha karena melalui hubungan tersebut pemerintah mengharapkan akan terciptanya sistem perekonomian yang baik, hubungan antar instansi pemerintahan untuk kepentingan pemenuhan data dan implementasi *G-to-E* adalah untuk peningkatan kinerja dan memberikan kemudahan kepada aparatur dalam melayani masyarakat.

2.7 *Interconnected Network (Internet)*

2.7.1 Pengertian *Internet*

Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memperoleh informasi. Informasi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, karena dengan informasi manusia dapat memiliki wawasan yang luas. Manusia dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, salah satunya melalui internet. Pengertian *internet* menurut Jugiyanto Hartono, yaitu:

> "Merupakan jaringan *(network)* komputer yang terdiri dari ribuan jaringan komputer independen yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jaringan komputer ini dapat terdiri dari lembaga pendidikan, pemerintahan, militer, organisasi bisnis dan organisasi-organisasi lainnya" (Hartono, 1988:341-342).

Setiap komputer yang terhubung dengan jasa layanan internet memiliki alamat internet. Pengguna internet dapat saling bertukar informasi melalui surat elektronik *(e-mail)* dan berinteraksi dengan jaringan-jaringan lainnya di internet lewat alamat internet. Informasi yang diperoleh dari internet akan lebih lengkap, karena jaringan internet merupakan jaringan komputer yang terbesar di dunia.

2.7.2 Cara-Cara Untuk Menghubungkan ke *Internet*

Cara menghubungkan internet dapat menggunakan cara, menurut Jugianto Hartono terdapat beberapa cara untuk menghubungkan ke *internet*, yaitu:

1. Menghubungkan ke internet lewat jasa internet *(Internet service provider)*
2. Menghubungkan ke internet lewat penyedia jasa informasi
3. Menghubungkan ke internet secara langsung

(Hartono, 1999: 342).

Untuk dapat menggunakan internet, pengguna internet dapat mengakses komputer pada perusahaan yang telah terkoneksi ke internet atau menjadi pelanggan dari sebuah *Internet Service Provider (ISP)*. ISP merupakan organisasi komersial yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa akses ke internet. Penyedia jasa informasi dan menghubungkan secara langsung dengan membuat jaringan *Local Area Network (LAN)*, merupakan cara yang paling mudah untuk menguhubungkan ke *internet*.

2.7.3 Pengertian *Website*

Perkembangan internet yang sangat cepat telah membentuk suatu komunitas pengguna internet yaitu *world wide web (www)* atau *website*. Pengertian *website* menurut Jack Febrian adalah:

> "Sebuah lokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon" (Febrian, 2005:180).

Website merupakan alamat di internet yang memudahkan pengguna internet untuk memenuhi kebutuhan informasi, melalui *website* pengguna *internet* dapat dengan mudah mencari informasi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sejalan yang dikemukakan Mico Pardosi, *Website* adalah dokumen dalam internet (lebih tepatnya URL atau alamat *internet*) biasa disebut juga *web atau homepage* (Pardosi, 2004:2).

Penggunaan *website* menjadi suatu hal yang penting, baik bagi individu, organisasi dan pemerintahan. *Website* merupakan alamat di internet yang dapat di akses oleh siapa saja bagi mereka yang mengetahui alamat tersebut dengan menggunakan *browser*. *Website* berisikan data-data, informasi dan gambar.

2.7.4 Fungsi *Website*

Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah *website*. *Website* berkembang menjadi fasilitas untuk menampilkan *browser* elektronik dan menyebabkan meningkatnya penggunaan intranet, *ekstranet* juga *internet*. Adapun fungsi *website* adalah:

1. Memperlebar Ruang Promosi
2. Mempermudah Komunikasi
3. Berinteraksi

(Safri, Lubis Muhamad Melalui *http//www.cert.or.id/muhammad/articels/e-gov-serdang* [2007/06/03]).

Website tidak sekedar hanya menyajikan informasi, akan tetapi *website* di dapat memperluas jaringan promosi, saling berkomunikasi melalui *e-mail* ataupun informasi kontak yang ada pada *website*. Sehingga memudahkan untuk saling berkomunikasi walaupun perbedaan lokasi yang teramat jauh dan komunikasi yang dilakukan sangat efesien waktu. Interaksi yang dapat dilakukan dalam *website* diantaranya adalah transaksi jual-beli, forum diskusi, *upload* atau *download* file dan lain sebagainya. Pembentukan *website* pada pemerintahan dapat berfungsi menjadi sebuah pusat pelayanan dimana masyarakat dapat melakukan segala sesuatunya melalui *website* mulai dari pendaftaran, aktifitas kependudukan, mengikuti berbagai *survei*, pembayaran *online* atas segala pajak dan retribusi.

2.7.5 Elemen-Elemen yang Dimiliki Sebuah *Website*

Website dapat dikatakan baik, apabila sebuah *website* memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Sistem pengorganisasian *content* atau isi *website* haruslah memiliki aristektur yang jelas dan terstruktur secara logis
2. Navigasi yang diterapkan dalam *website* haruslah mudah cara pengoperasiannya
3. Isinya harus *up to date* dalam arti kata selalu diperbaharui sehingga relevan dengan kebutuhan
4. Waktu untuk menampilkan satu halaman penuh *website* haruslah cepat (disarankan tidak lebih dari 10 detik), sehingga perlu dipertimbangkan ukuran memori total dari sebuah desain *website*
5. Tampilan *website* haruslah menarik dalam arti kata memiliki desain grafis yang sesuai dengan karakteristiknya *audience* nya
6. *Website* haruslah dapat dinikmati oleh semua orang, terlepas dari faktor perbedaan usia, agama, bahasa, maupun hal-hal lain yang terdapat di dalam masyarakat
7. Unsur privasi harus pula diperhatikan dalam arti kata para penggunaan *website* merasa yakin bahwa tidak hal-hal yang akan merugikan dirinya

terkait dengan isu keamanan berinteraksi secara digital ketika mengakses *website*

(Indrajit, 2005:56).

Website merupakan sebuah media untuk kebutuhan pelayanan. Pembuat *website* harus mengetahui dan memperhatikan kebutuhan pengguna *website*. supaya menarik minat pengguna website untuk selalu mengakses, pada dasarnya adalah tampilan *website* harus terstruktur secara logis, mudah dalam pengoperasian, informasi yang diberikan merupakan informasi terbaru, loding yang tidak terlalu lama, desain grafis dari tampilan *website* harus sesuai dengan karaktristik pengguna *website*, dapat dinikmati oleh semua orang dan keamanan bagi penggunanya.